PEMERINTAH KOTA BONTANG

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Moh. Roem Gedung Graha Praja Blok IV Lantai I Telp.(0548) 20393
Fax. (0548) 20400 Website :bapelitbang.bontangkota.go.id

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2021

BONTANG, MARET 2022

KATA PENGANTAR

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir atau tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang 2016-2021. Bapelitbang Kota Bontang terus berupaya untuk meningkatkan perannya sebagai unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota Bontang dalam fungsinya sebagai perumus kebijakan bidang perencanaan, *think tank*, koordinator, pengendali dan evaluator, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan permasalahan kota melalui kegiatan perencanaan pembangunan daerah dan kegiatan-kegiatan strategis lainnya yang bersifat mendukung perencanaan pembangunan.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Bapelitbang Kota Bontang Tahun 2016-2021.

Berdasarkan hasil pencapaian tugas dan fungsi Bapelitbang Kota Bontang, seluruh kebijakan, program, dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan dengan baik serta secara umum mencapai sasaran strategis, indikator, dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Terdapat beberapa capaian yang masih di bawah target dan hal tersebut akan dijadikan dasar untuk memperbaiki perencanaan dan kinerja di masa yang akan datang. Selanjutnya hasil pencapaian tersebut akan dijelaskan dalam Laporan Kinerja Bapelitbang Tahun 2021.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Bapelitbang Kota Bontang.

Bontang, Maret 2022
Kepala Bapelitbang,

Ir. Amiruddin, MP
NIP. 196505051993031013

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang selama tahun 2021. Capaian kinerja (performance results) tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator hasil (*outcomes)* atau minimal keluaran (*outputs)* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pada tahun 2021 Bapelitbang Kota Bontang menetapkan sebanyak empat (4) sasaran, yaitu: 1) Terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, 2) Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan, 3) Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, dan 4) Optimalisasi penelitian dan pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Secara keseluruhan terdapat 9 indikator sasaran. Dari jumlah tersebut, 5 indikator telah mencapai target. Sedangkan 4 indikator lainnya walaupun belum memenuhi target telah mencatatkan rata-rata capaian yang cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum capaian seluruh sasaran Bapelitbang Tahun 2021 telah cukup baik. Hasil-hasil tersebut dijelaskan dalam Laporan Kinerja ini beserta analisis capaiannya.

Beberapa capaian yang diraih selama tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

- ✓ Antusiasme masyarakat yang tinggi dalam proses perencanaan pembangunan.
- ✓ Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran telah cukup baik.
- ✓ Aplikasi perencanaan (eplanning) telah terintegrasi dengan aplikasi penganggaran dan penatausahaan keuangan (*Sistem Informasi Pembangunan Daerah/SIPD*).
- ✓ Adanya rintisan penelitian dan pengembangan untuk dalam memperkuat perencanaan terutama disusunnya Rencana Induk Kelitbangan Kota Bontang. Hasil litbang yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul di daerah dalam semua sector pembangunan.

Namun dalam pelaksanaan selama 2021 masih terdapat beberapa kendala dan kelemahan-kelemahan yang harus dibenahi, diantaranya :

- ✓ Adanya bancana nasional yaitu wabah Pandemi Covid-19, yang sangat berpengaruh pada capaian kinerja;
- ✓ Monitoring dan evaluasi (monev) belum berjalan dengan maksimal dan belum digunakan sebagai alat untuk pengambilan kebijakan. Hal ini telah menjadi isu strategis selama beberapa tahun terakhir. Monitoring dan evaluasi harus diupayakan agar dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan perencanaan selanjutnya.
- ✓ Tingkat penyerapan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang masih belum mencapai target walaupun capaiannya meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini memerlukan penanganan serius untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

- ✓ Penentuan prioritas dalam penganggaran masih belum baik. Selain itu, diperlukan upaya menangkap peluang dari sumber pendanaan lain di luar APBD sehingga target kinerja daerah tetap dapat tercapai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR LAMPIRAN vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Dasar Pembentukan Organisasi 1
B. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2
C. Struktur Organisasi 2
D. Sumber Daya Manusia 4
E. Aspek Strategis Organisasi 6
F. Permasalahan Utama (*Strategic Issues*) yang Dihadapi Organisasi 7
G. Sarana dan Prasarana Kerja 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA 12
A. Perencanaan Strategis 12
B. Indikator Kinerja Utama 19
C. Rencana Kinerja Tahunan 22
D. Perjanjian Kinerja 29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 31
A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akip Tahun Sebelumnya 31
B. Capaian Kinerja 33
C. Analisis Capaian Kinerja 35
D. Realisasi Anggaran 61
BAB IV PENUTUP 68
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan 5
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat Dan Golongan 6
Tabel 1.3 Aset Bapelitbang Kota per 31 Desember 2021 11
Tabel 2.1 Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD dengan Tugas Fungsi Bapelitbang 12
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Bapelitbang 13
Tabel 2.3 Program/Kegiatan untuk Mencapai Tujuan/Sasaran 14
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapelitbang Tahun 2016-2021 19
Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan Bapelitbang 2021 22
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 29
Tabel 2.7 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 30
Table 3.1 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun Sebelumnya 31
Tabel 3.2 Rencana Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Bapelitbang Tahun 2020 32
Tabel 3,3 Hasil Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Bapelitbang Tahun 2020 33
Table 3.4 Pengukuran Kinerja Bapelitbang Per Triwulan Tahun 2021 34
Table 3.5 Pengukuran Kinerja Tahun 2021 35
Table 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2021 36
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2021 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya 36
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 38
Tabel 3.9 Realisasi Keuangan Sasaran I Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 39
Tabel 3.10 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran 1 37
Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2021 37
Tabel 3.12 Realisasi keuangan indikator kinerja Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD 39
Tabel 3.13 Realisasi Kuangan pada Indikator Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke

dalam APBD 44
Tabel 3.14 Realisasi Kuangan pada Indikator Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD 45
Tabel 3.15 Kehadiran Komponen Masyarakat dalam Musrenbang 46
Tabel 3.16 Realisasi Kuangan pada Indikator Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan 47
Tabel 3,17 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2021 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya 47
Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 48
Tabel 3,19 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran 2 50
Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2021 50
Tabel 3.21 Capaian Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021 50
Tabel 3.22 Realisasi Kuangan pada Indikator Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD 53
Tabel 3.23 Realisasi Kuangan pada Indikator Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%) 54
Table 3.24 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2021 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya 54
Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 55
Tabel 3.26 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran 3 56
Tabel 3.27 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2021 57
Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2021 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya 58
Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 58
Tabel 3.30 Realisasi Keuangan indikator Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah 60
Tabel 3.31 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran 4 60
Tabel 3.32 Realisasi Anggaran Tahun 2021 66
Tabel 3.33 Klasifikasi Nilai Efisiensi 66
Tabel 3.34 Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020..... 68

Tabel 3.35 Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Bapelitbang selama 4 tahun (2018 – 2021) 74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang 3
Gambar 1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Bapelitbang Kota Bontang 5
Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2021 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya 37
Gambar 3.2 Screenshot Aplikasi Simpatiku 40
Gambar 3.3 Grafik Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2021 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya 49
Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan Musrenbang 2021 51
Gambar 3.5 Grafik Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2021 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya 57
Gambar 3.6 Dokumentasi Rapat Operasional Pengendalian Kegiatan 2021 60
Gambar 3.7 Dokumentasi Rapat Paripurna LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2020 60
Gambar 3.8 Grafik Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2021 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya 62
Gambar 3.9 Dokumentasi Kegiatan Serah Terima Seremonial Penghargaan Peserta Lomba Si Peena Tahun 2021 65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Tim Penyusun LKjIP Bapelitbang Tahun 2021

Lampiran 2 : SK Penetapan Indikator Utama Bapelitbang Tahun 2016 - 2021

Lampiran 3 : Perjanjian Kinerja Kepala Bapelitbang

a. Perjanjian Kinerja Kepala Bapelitbang Tahun 2021

b. Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bapelitbang Tahun 2021

Lampiran 4 : Rencana Aksi Atas Kinerja Bapelitbang Tahun 2021

Lampiran 5 : Cascading Bapelitbang Tahun 2021

Lampiran 6 : Rencana Kerja Tahunan Bapelitbang Tahun 2021

Lampiran 7 : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi atas Kinerja Bapelitbang Tahun 2021

a. Monev Rencana Aksi atas Kinerja Bapelitbang Tahun 2021 Triwulan I

b. Monev Rencana Aksi atas Kinerja Bapelitbang Tahun 2021 Triwulan II

c. Tindaklanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi atas Kinerja Triwulan II

d. Monev Rencana Aksi atas Kinerja Bapelitbang Tahun 2021 Triwulan III

e. Tindaklanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi atas Kinerja Triwulan III

f. Monev Rencana Aksi atas Kinerja Bapelitbang Tahun 2021 Triwulan IV

Lampiran 8 : Rencana Tindaklanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Bapelitbang Tahun 2020

a. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Bapelitbang Tahun 2020

b. Rencana Tindaklanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Bapelitbang Tahun 2020

c. Laporan Hasil Tindaklanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Bapelitbang Tahun 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2). Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a). rencana pembangunan jangka panjang daerah; b). rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan c). rencana pembangunan tahunan.

Sementara itu, penelitian dan pengembangan (litbang) merupakan aktivitas inovatif yang diselenggarakan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mengembangkan produk dan layanan baru atau menyempurnakan produk dan layanan yang sudah ada melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pemerintahan daerah, litbang berperan penting dalam mendorong kemajuan daerah melalui fungsinya sebagai *think tank* dalam merumuskan kebijakan pemerintah.

Pentingnya peran lembaga litbang tersebut terangkum pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tercantum pada Pasal 209 dan 219. Amanah tersebut menyebutkan pentingnya pembentukan badan daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan, serta pelatihan dan penelitian pengembangan. Pasal 373 dan Pasal 374 menyatakan litbang sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan Pasal 388 menyebutkan peran litbang dalam penilaian inovasi daerah.

Pemerintah Kota Bontang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menetapkan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang sebagai Perangkat Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

B. Tugas Dan Fungsi

Tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang berdasarkan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penjunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan; dan
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang, susunan organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang
(Peraturan Wali Kota Bontang Nomor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang)

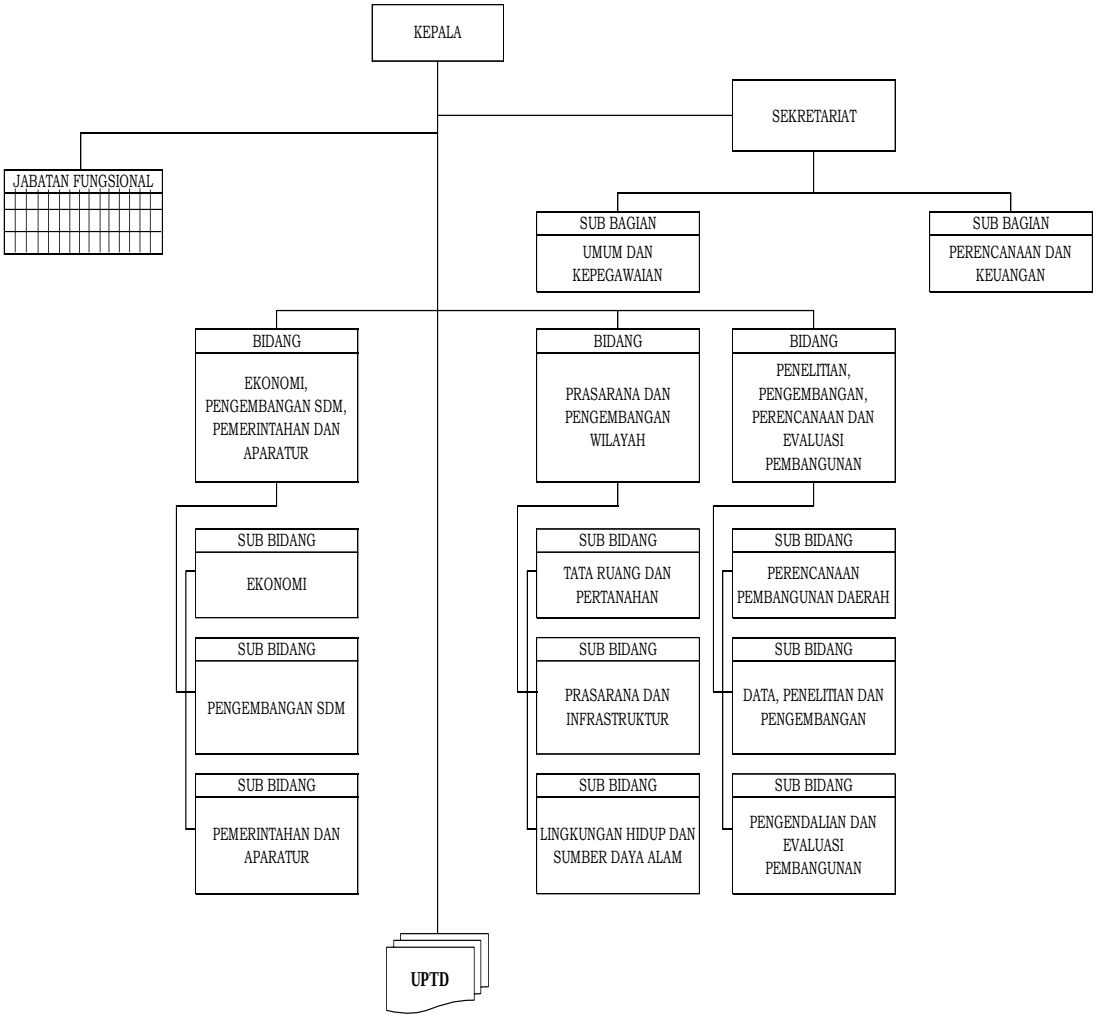

3. Bidang Ekonomi, Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur, membawahi:
   a. Sub Bidang Ekonomi;
   b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
   c. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
4. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
   a. Sub Bidang Tata Ruang dan Pertanahan;
   b. Sub Bidang Prasarana dan Infrastruktur;
   c. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
5. Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, membawahi:

a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Sub Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan;
c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang-bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Sub bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sedangkan sub bidang-sub bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

D. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci dan berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jumlah pegawai pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang pada bulan Desember tahun 2021 tercatat sebanyak 50 orang pegawai yang terdiri dari 35 orang PNS dan 15 orang Non PNS.

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Bapelitbang terdiri dari 31 pria dan 19 wanita. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas adalah lulusan S1 (sebanyak 32 orang), sisanya adalah S2 (8 orang), D1/D3 (2 orang), SMA (8 orang). Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan
(Desember 2021)

No	Uraian	S2	S1	D 3	SLTA	Jumlah
1	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	3	3	2	5	13
3	Bidang Litbang, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	1	11	-	3	15
4	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	2	9	-	0	11
5	Bidang Ekonomi, Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur	1	9	-	0	10
	TOTAL	8	32	2	8	50

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang, 2021

Grafik 1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Bapelitbang Kota Bontang

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bapelitbang Kota Bontang adalah: 1 (satu) orang Eselon II; 4 (empat) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 3 (tiga) orang kepala bidang; 11 (sebelas) orang Eselon IV dan Fungsional Perencana 6 (enam), Fungsional Penata Ruang 2 (dua) orang dan non eselon sebanyak 27 orang sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat Dan Golongan
(Desember 2021)

Status Kepegawaian/Pangkat	Gol. / Ruang	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Unit Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan								Total
				Sekretariat		Bidang Litbang, Perencanaan & Evaluasi Pembangunan		Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah		Bidang Ekonomi, Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur		
		Lk	*Pr*	*Lk*	*Pr*	*Lk*	*Pr*	*Lk*	*Pr*	*Lk*	*Pr*	
A. Struktural (PNS)												
1. Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2. Pembina Tingkat I	IV/b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3. Pembina	IV/a	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3
4. Penata Tingkat I	III/d	-	-	1	-	1	1	1	1	1	3	9
5. Penata	III/c	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3
6. Penata Muda Tk. I	III/b	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	3
7. Penata Muda	III/a	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	3
8. Pengatur Tk. I	II/d	-	-	2	1	1	-	0	-	-	-	4
9. Pengatur	II/c	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
10. Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
B. Fungsional (PNS)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1. Perencana Ahli Muda	III/c	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3
2. Penata Ruang Ahli Pertama	III/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3. Perencana Ahli Pertama	III/b	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
4. Penata Ruang Ahli Pertama	III/b	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
5. Penata Ruang Ahli Pertama	III/a	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
C. Pegawai Honorer	-	-	-	1	3	3	2	1	3	2	-	15
TOTAL		**1**	**0**	**9**	**4**	**11**	**4**	**6**	**5**	**5**	**5**	**50**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang, 2021

E. Aspek Strategis Organisasi

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pembangunan serta kualitas pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dalam semua sektor semakin meningkat mengingat kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara semakin berkembang. Konsekuensinya, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah juga semakin besar.

Selain itu, otonomi daerah melimpahkan kewenangan dari pusat ke daerah dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada secara optimal untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Hal ini memberikan prospek dan peluang bagi daerah-daerah untuk mengembangkan potensi wilayahnya, mengelola aset-aset yang dimiliki, sekaligus bisa memperoleh hasil kekayaan secara penuh tanpa campur tangan pusat. Namun di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan pengelolaan secara profesional dan akuntabel

dengan pengaturan melalui kebijakan-kebijakan yang konsisten dan tidak bertentangan dengan sebagian besar aspirasi masyarakat dan *stakeholder*.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat dan tantangan pengelolaan otonomi daerah tersebut, fungsi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan menjadi semakin strategis untuk mewujudkan perencanaan yang koordinatif, terarah, terpadu, serta partisipatif sehingga proses-proses perencanaan pembangunan secara kolektif dapat menyelesaian masalah dan memenuhi harapan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, litbang berperan strategis dalam memperkuat perencanaan. Hasil litbang yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul di daerah dalam semua sektor pembangunan. Sehingga, litbang turut menentukan arah dan strategi pembangunan melalui kebijakan yang didasari oleh kajian dan penelitian (*research based policy*).

Pentingnya kelitbangan juga berdasarkan alasan teoretikal. Dalam konsep manajemen strategis, litbang berperan dalam melakukan pemindaian (*scanning)* lingkungan internal dan eksternal sebagai dasar perencanaan (*planning by research*), fungsi formulasi kebijakan (*formulating policy*), dan fungsi kontrol (*controlling*).

F. Permasalahan Utama *(Strategic Issues)* Yang Dihadapi Organisasi

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan

Lembaga pemerintah senantiasa dituntut untuk melakukan penyesuaian peran seiring dengan perubahan dinamika sosial, politik, dan ekonomi, baik dari lingkungan nasional maupun global. Untuk mengantisipasi hal tersebut, peran penguatan kapasitas

kelembagaan menjadi unsur wajib yang harus diperhatikan.

Aspek-aspek yang harus menjadi perhatian terkait dengan penguatan kapasitas kelembagaan di Bapelitbang adalah: pengembangan keterampilan dan kompetensi individu (aparatur Perencana) sehingga masing-masing dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; pengembangan budaya kerja, sistem, dan proses dalam organisasi untuk mencapai tujuan; dan pengembangan serta penguatan jalinan keluar dalam rangka menumbuhkembangkan kemitraan secara intensif, ekstensif, dan solid.

2. Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan berkualitas

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 31 : data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif maupun gambar visual yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya. Hal ini berarti data yang diperoleh haruslah berupa fakta bukan hasil manipulasi ataupun rekayasa. Dengan memiliki basis data dan informasi yang valid dan terukur, maka proses perencanaan pembangunan yang baik dan komprehensif akan menjadi titik penting untuk berhasilnya pembangunan.

Ketersediaan data yang aktual dan akurat amat dibutuhkan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam rangka menentukan perencanaan dan evaluasi program-program pembangunan. Untuk mendapatkan data yang akurat ini pada level tertentu sangat sulit diperoleh belum lagi ditambah dengan kesulitan mendapatkan data yang terbaru (*up to date*). Tanpa data yang akurat dan *up to date*, hasil evaluasi dan perencanaan akan menghasilkan data atau informasi yang keliru. Hal ini akan mengakibatkan salahnya perencanaan maupun pengalokasian anggaran pembangunan untuk tahun berikutnya. Permasalahan-permasalahan tersebut terutama ditimbulkan karena kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data yang ada pada berbagai institusi, diluar ketersediaan SDM maupun biaya untuk proses pengumpulan dan pengolahan data yang terbatas.

3. Peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Selain itu, perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena perencanaan merupakan pijakan awal dalam tahapan selanjutnya seperti pengorganisasian,

pengarahan, pengendalian dan evaluasi.

Pendayagunaan informasi serta teknologi yang tepat juga akan sangat mempengaruhi suatu proses pengambilan keputusan secara efektif serta akan mendukung proses perencanaan secara keseluruhan. Optimalisasi sistem informasi perencanaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan kualitas perencanaan. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam proses perencanaan pembangunan adalah keterlibatan masyarakat dalam perencanaan untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah baik dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga tahap evaluasi.

Isu penting yang juga perlu diperhatikan adalah keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara aspek perencanaan dengan penganggaran, dan antar satuan unit kerja. Hal ini sangat penting karena target capaian suatu program dan kegiatan dapat dicapai melalui sinergi program dan kegiatan antar perangkat daerah. Idealnya, perencanaan dan penganggaran harus terpadu, konsisten, dan sinkron antara tahap satu dengan yang lain, karena penganggaran merupakan modal awal untuk mewujudkan target-target kinerja yang direncanakan.

4. Efektivitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan melalui kegiatan-kegiatan koreksi, evaluasi, dan penyesuaian selama pelaksanaan program/kerja oleh Perangkat Daerah. Tidak efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik secara metodologi, pelaksanaan, maupun penggunaannya merupakan salah satu ciri dari penyusunan perencanaan yang tidak tepat. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sedangkan evaluasi merupakan tahapan membandingkan serangkaian kegiatan antara realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Jadi, sistem pengendalian dan evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan capaian perencanaan dalam pelaksanaan setiap periode pembangunan daerah.

5. Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan

Penelitian dan pengembangan berperan strategis dalam memperkuat perencanaan. Hasil litbang yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul di daerah dalam semua sektor pembangunan. Sehingga, litbang turut menentukan arah dan strategi pembangunan melalui kebijakan yang didasari oleh kajian dan penelitian (*research based policy*).

6. Pandemi Covid-19

Adanya bencana berskala nasional yaitu Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada pelaksanaan kegiatan pembangunan pada berbagai sektor. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yaitu dengan menyusun kebijakan teknis bidang perencanaan terkait dengan penganan penyebaran pandemi covid-19.

G. Sarana Dan Prasarana Kerja

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dalam bentuk aset. Secara keseluruhan aset tersebut telah memadai dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan. Aset yang ada diupayakan maksimal daya gunanya melalui pengecekan dan pemeliharaan. Selain itu, setiap tahun juga disusun rencana kebutuhan barang dan aset kantor guna memastikan penyediaan yang efisien dan pemanfaatan secara efektif.

Tabel 1.3 Aset Bapelitbang Kota Bontang per 31 Desember 2021

Nama Bidang	Jumlah Nilai Aset Per 31 Desember 2021				
	Nilai Perolehan (Intra) (Rp.)	Akum.Penyusutan 31 Des 2020 (Rp.)	Beban Penyusutan 2021 (Rp.)	Total Akum.Penyusutan TA 2021 (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)
(1)	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5) = (1)-(4)
ASET TETAP					
1. Tanah	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Tanah	-	-	-	-	-
2. Peralatan dan Mesin	**7.789.800.676**	**4.988.066.977**	**637.931.839**	**5.625.998.816**	**2.163.801.860**
Alat Angkutan	2.203.781.300	1.629.652.730	119.042.141	1.748.694.871	455.086.429
Alat Bengkel dan Alat Ukur	18.535.000	16.027.000	2.508.000	18.535.000	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.884.362.613	1.687.221.840	270.503.524	1.957.725.364	926.637.249
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	269.210.769	215.240.030	18.186.195	233.426.225	35.784.544
Komputer	2.413.910.994	1.439.925.377	227.691.979	1.667.617.356	746.293.638
3. Aset Tetap Lainnya	**110.476.600**	**-**	**-**	**-**	**110.476.600**
bahan Perpustakaan	110.476.600	-	-	-	**110.476.600**
J U M L A H	**7.900.277.276**	**4.988.066.977**	**637.931.839**	**5.625.998.816**	**2.274.278.460**
ASET LAINNYA	**Nilai Perolehan (Intra)**	**Akum.Amortisasi/Penyusutan Per 31 Des 2020**	**Beban Amortisasi/Penyusutan 2021**	**Total Akum.Amortisasi/Penyusutan TA 2021**	**Nilai Buku**
Software/Aset Lainnya	**2.926.643.522**	**2.793.252.522**	**51.708.000**	**2.844.960.522**	**81.683.000**
Sofware	1.427.727.522	1.294.336.522	51.708.000	1.346.044.522	81.683.000
Hasil Kajian	1.498.916.000	1.498.916.000	-	1.498.916.000	-
Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-	-	-	-
Aset Lainnya	**254.392.695**	**248.699.231**	**-**	**248.699.231**	**5.693.464**
Aset lain-lain	254.392.695	248.699.231	-	248.699.231	5.693.464
J U M L A H	**3.181.036.217**	**3.041.951.753**	**51.708.000**	**3.093.659.753**	**87.376.464**

Sumber: Berita Acara Rekonsiliasi Database Aset antara Bidang Kekayaan dan Aset BPKAD dan Bapelitbang Kota Bontang per 31 Desember 2021

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang terpilih sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021 adalah: "Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat"

Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 3 (tiga) misi yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Menjadikan Kota Bontang sebagai *Smart City* melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Menjadikan Kota Bontang sebagai *Green City* melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
3. Menjadikan Kota Bontang sebagai *Creative City* melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim.

Dikaitkan dengan visi dan misi tersebut di atas, serta urusan Penunjang yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang, maka fungsi dan tugas Bapelitbang terkait dengan misi 1, yaitu: "menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia" Rumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Tahun 2016-2021 untuk mendukung pencapaian Misi 1 dimaksud dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD dengan Tugas Fungsi Bapelitbang

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Menjadikan Kota Bontang sebagai *Smart City* melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia	Mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif

Berdasarkan hal tersebut, tujuan dan sasaran dalam Renstra Bapelitbang 2016-2021 (Review Kedua) disusun sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Bapelitbang

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Mewujudkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD	1.	Terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1.	Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD	90%	92%	94%	96%	98%	100%
		Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/Sasaran RPJMD			2.	Persentase akurasi data SIPD	90%	90%	100%	100%	100%	100%
			2.	Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan	1.	Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD	79,9%	80%	85%	90%	100%	100%
					2.	Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD	80%	80%	85%	90%	95%	100%
					3.	Tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD	15%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%
					4.	Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan	90%	100%	100%	100%	100%	100%
			3.	Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan	1	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/Sasaran RPJMD	80%	80%	85%	90%	95%	100%
					2	Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)	80%	85%	90%	95%	100%	100%

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
			4	Optimalisasi penelitian dan pengembangan	Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	57%	60%	65%	67%	69%	70%

Tabel 2.3
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan untuk Mencapai Tujuan/Sasaran
(sesuai dengan Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan *Sub Kegiatan*	
1.	Mewujudkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan daerah yang berkualitas	1. Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1.1 Persetase keterisian data pembangunan dalam SIPD	1.1.1.	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**
			1.2. Persentase akurasi data SIPD		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
					Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
					Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
		2. Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan serta konsisten antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan	2.1. Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD	2.1.1.	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**
					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
					Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
					Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan *Sub Kegiatan*	
				2.1.2.	***Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah***
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			2.2.. Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD	2.2.1.	***Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah***
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Program, Kegiatan dan *Sub Kegiatan*
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
			2.3. Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD	2.3.1.	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**
					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
					Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
					Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
					Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
			2.4. Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan	2.4.1.	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**
					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
					Pelaksanaan Konsultasi Publik
		3. Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi	3.1. Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD	3.1.1.	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
					Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
					Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan *Sub Kegiatan*	
				3.1.2.	***Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah***
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
			3.2. Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)	3.2.1.	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
					Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan *Sub Kegiatan*	
		4. Optimalisasi penelitian dan pengembangan	4.1. Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	4.1.1.	**Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
					Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
					Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi
					Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
					Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
					Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
		5. *Penunjang (Program rutin)*		5.0.1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
					Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Bangunan Kantor
					Penyediaan Bahan Logitik Kantor
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan *Sub Kegiatan*
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pengadaan Mebel
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pejak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang tahun 2016-2021 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang Nomor 014.1 Tahun 2018 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang Tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapelitbang Tahun 2016-2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen	Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD	%	Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat	Tingkat keterisian data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) = jumlah elemen data yang tersedia pada SIPD/jumlah elemen data yang seharusnya ada pada SIPD x 100%	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
	perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase akurasi data SIPD	%	dipertanggungjawabkan (UU No. 25 tahun 2014, pasal 31). Ketersediaan data yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan	% = jumlah elemen data yang sesuai kondisi/jumlah elemen data yang tersedia x 100%	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
2	Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan	Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD	%	Harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan; program-program dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah juga rencana tahunan (Permendagri 54 /2010)	% = jumlah program dalam RKPD yang sesuai dengan program RPJMD/jumlah total program RPJMD x 100%	Dokumen RPJMD dan RKPD
		Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD	%	Penjabaran kegiatan dalam RKPD ke dalam APBD menjamin terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan	% = jumlah kegiatan yang dianggarkan dalam APBD/jumlah kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD x 100%	Dokumen RKPD dan Dokumen APBD
		Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD	%	Aspiratif merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Bapelitbang sebagai lembaga perencana. Oleh karenanya, dokumen perencanaan harus mencerminkan aspirasi masyarakat	% = jumlah aspirasi masyarakat yang diakomodasi dalam RKPD/jumlah total aspirasi masyarakat x 100%	Data Musrenbang, e-planning

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan	%	Keterwakilan semua elemen masyarakat menjamin terpenuhinya aspek partisipatif dalam perencanaan pembangunan.	% = jumlah komponen masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang/total jumlah komponen masryarakat yang harus hadir dalam Musrenbang x 100%	Data Musrenbang
3	Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD	%	Pengendalian dan evaluasi diperlukan untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah	% = jumlah indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target/jumlah total indikator kinerja sasaran pembangunan daerah x 100%	Dokumen LKPJ
		Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)	%	Perangkat Daerah yang berkinerja baik akan berkontribusi positif terhadap kinerja pembangunan daerah	% = jumlah Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)/total jumlah Perangkat Daerah x 100%	Dokumen monitoring dan evaluasi
4	Optimalisasi penelitian dan pengembangan	Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	%	Penelitian dan pengembangan merupakan elemen kunci bagi organisasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanannya.	% = jumlah dokumen penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan/jumlah total dokumen penelitian dan pengembangan x 100%	Monitoring dan evaluasi penelitian dan pengembangan

C. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan Bapelitbang Kota Bontang 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahunan Bapelitbang 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Satuan	Target
1	Mewujudkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan daerah yang berkualitas	1. Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1.1 Persetase keterisian data pembangunan dalam SIPD	persen	100	1.1.1	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**persen**	**100**
			1.2. Persentase akurasi data SIPD	persen	100		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persen	100
							Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	data	3200
							Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		
		2. Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan serta konsisten antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan	2.1. Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD	persen	100	2.1.1	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**persen**	**100**
							Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	dokumen	3
							Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	orang	100
							Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	3

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program, Kegiatan dan *Sub Kegiatan*		Satuan	Target
						2.1.2.	***Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah***	**persen**	**100,00**
							Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	OPD	17
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	2
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	2
							Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	OPD	6
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PD	4
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PD	2
							Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	OPD	8
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PD	3
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PD	5

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program, Kegiatan dan *Sub Kegiatan*	Satuan	Target
			2.2.. Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD	persen	100,00	2.2.1. ***Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah***	**persen**	**100,00**
						Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	OPD	17
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	OPD	13
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	OPD	9
						Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	OPD	6
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	OPD	2
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	OPD	5
						Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	OPD	8
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	OPD	3
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	OPD	5
			2.3. Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD	persen	≥ 25,00	2.3.1. **Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**persen**	**100,00**
						Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	usulan	92
						Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kecamatan	3

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program, Kegiatan dan *Sub Kegiatan*		Satuan	Target
							Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	orang	300
							Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	OPD	31
			2.4. Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan	persen	100,00	2.4.1.	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**persen**	**100,00**
							Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	dokumen	1
							Pelaksanaan Konsultasi Publik	dokumen	1
		3. Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan	3.1. Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD	persen	100,00	3.1.1.	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**persen**	**100,00**
							Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen	5
							Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	dokumen	2
							Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	SPM	5
						3.1.2.	***Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah***	**persen**	**100,00**
							Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	OPD	17
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	OPD	11
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	OPD	6

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program, Kegiatan dan *Sub Kegiatan*		Satuan	Target
							Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	OPD	6
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	OPD	6
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	OPD	6
							Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	OPD	8
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	OPD	6
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	OPD	2
			3.2. Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)	persen	100,00	3.2.1.	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**persen**	**100,00**
							Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen	1
							Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	dokumen	1
		4. Optimalisasi penelitian dan pengembangan	4.1. Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	persen	70,00	4.1.1.	**Program Penelitian Dan Pengembangan**	**persen**	**100,00**
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	kajian	1
							Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	kajian	1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target		Program, Kegiatan dan *Sub Kegiatan*	Satuan	Target
							Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	data	400
								inovasi	50
							Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	rekomendasi	1
							Pengembangan Inovasi dan Teknologi	inovasi	150
							Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	kajian	1
							Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	jenis	3
							Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	0rang	50
								orang	50
		5. *Penunjang (Program rutin)*				5.0.1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**persen**	**100,00**
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	pegawai	35
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pegawai	35
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	pegawai	10
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	pegawai	10
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	3
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Bangunan Kantor	jenis	5
							Penyediaan Bahan Logitik Kantor	bulan	12
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jenis	17
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	200

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program, Kegiatan dan *Sub Kegiatan*	Satuan	Target
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	buah	850
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	orang	15
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenis	5
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pejak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan	22
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jenis	4

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada prinsipnya adalah penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, perjanjian kinerja merupakan penugasan kepala daerah kepada kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima (Kepala Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Kepala Daerah) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja (PK) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(5)*
1	Terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD	100%
		Persentase akurasi data SIPD	100%
2	Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan	Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD	100%
		Persentase Penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD	100%
		Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD	≥ 25%
		Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan	100%
3	Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD	100%
		Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)	100%
4	Optimalisasi penelitian dan pengembangan	Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	70%

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Ket.
		Murni	Perubahan	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.400.180.898	10.251.574.795	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	795.040.573	1.204.940.874	APBD
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	194.275.065	399.280.665	APBD
4.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	745.641.200	996.932.874	APBD
Total Anggaran		**11.135.137.736**	**12.852.729.208**	

Alokasi anggaran belanja Bapelitbang Kota Bontang sesuai Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA) 2021 sebesar **Rp12.852.729.208,00** yang terdiri atas :

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)
1	Belanja Operasional	11.556.012.351
2	Belanja Modal	1.296.716.857
3	Belanja Tak Terduga	-
4	Belanja Transfer	-
	Jumlah	**12.852.729.208**

Tabel 2.7
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Pagu Anggaran			
		Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Realisai (Rp.)	Prosentasi (%)
1	Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	91.177.300	91.177.300	84.023.500	92,15
2	Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan serta konsisten antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan	640.083.607	1.073.337.482	930.565.573	86,70
3	Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan	183.123.181	183.123.181	113.169.750	61,80
4	Optimalisasi penelitian dan pengembangan	825.641.200	996.932.874	931.536.098	93,44
5	*Penunjang (Program rutin)*	8.843.657.238	10.251.574.795	9.903.397.066	96,60
	Total Anggaran	**10.857.189.493**	**12.852.729.208**	**12.155.451.237**	**94,57**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akip Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2020 Inspektorat Kota Bontang telah melakukan evaluasi atas implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang tahun sebelumnya (2019) dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun Sebelumnya

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	
			Tahun 2019	Tahun 2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,79	26,09
b.	Pengukuran Kinerja	25	19,69	20,00
c.	Pelaporan kinerja	15	12,85	12,85
d.	Evaluasi Internal	10	5,71	5,95
e.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	15,73	15,15
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**78,86**	**80,03**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**BB**	**A**

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan termasuk dalam kategori A (>80-90) dengan interpretasi **MEMUASKAN**, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. Bersama dengan hasil evaluasi tersebut, Inspektorat Kota Bontang juga memberikan rekomendasi yang kemudian ditindaklanjuti sebagai berikut :

a. Memanfaatkan target-target dalam rencana aksi dijadikan dasar pelaksanaan setiap kegiatan dan acuan dalam mengevaluasi capaian autput kegiatan dan mendokumentasikannya;
b. Menyusun laporan pembahasan hasil evaluasi atas pencapaian Rencana Aksi kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta mendokumentasikannya hasilnya;
c. Menyusun laporan hasil pemantauan Rencana Aksi secara berkala yang menyajikan informasi terkait alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan; dan
d. Menyusun laporan hasil tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Rencana Aksi.

Tabel 3.2
Rencana Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Bapelitbang Tahun 2020

No.	Bidang Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut		Tahapan	Target Periodik												Penanggung Jawab
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Memanfaatkan target-target dalam rencana aksi dijadikan dasar pelaksanaan setiap kegiatan dan acuan dalam mengevaluasi capaian autput kegiatan dan mendokumentasikannya	Dalam memonitoring Rencana Aksi atas Kinerja dilakukan dengan melihat target-target setiap kegiatannya, untuk memantau perkembangan kegiatan apakah sesuai dengan target atau tidak, dan apabila tidak sesuai target khusunya dibawah target, maka dapat diketahui apa permasalahannya dan solusinya.	1.	Mengevaluasi dan menganlisa capaian Rencana Aksi atas Kinerja terhadap target capaian yang telah ditetapkan per triwulan													Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2.	Menyusun laporan pembahasan hasil evaluasi atas pencapaian Rencana Aksi kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta mendokumentasikannya hasilnya	Telah dilakukan pemantauan atas Rencana Aksi secara periodik dan analisis capaiannya digunakan untuk perbaikan kinerja selanjutnya. Dan hasil Analisa di sampaikan kepada Kepala Bapelitbang, kemudian Kepala bapelitbang memberikan arahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk perbaikan kinerja	1	Monitoring hasil capaian Rencana Aksi secara periodik pada triwulan sebelumnya													Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
			2	Mengevaluasi dan menganalisa hasil Monitoring capaian Rencana Aksi triwulan sebelumnya secara periodik													
			3	Melaporankan hasil evaluasi dan analisa kepada pimpinan													
			4	Membuat konsep surat Tindaklanjut Hasil Monitoring Rencana Aksi atas Kinerja													
			5	Menyampaikan surat Tindaklanjut Hasil Monitoring Rencana Aksi atas Kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan													
3.	Menyusun laporan hasil pemantauan Rencana Aksi secara berkala yang menyajikan informasi terkait alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	Penyusunan laporan hasil pemantauan Rencana Aksi secara berkala, telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan monoitoring pencapaian Rencana Aksi atas Kinerja secara berkala per Triwulan untuk tahun 2020	1	Menyiapkan bahan-bahan hasil Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi atas Kinerja per triwulan													Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
			2	Membuat konsep laporan hasil Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi atas Kinerja per triwulan													
			3	Mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan unuk mendapatkan arahan dan persetujuan													
			4	Finalisasi Laporan Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi atas Kinerja per triwulan, dalam bentuk Telaahan Staf													
4.	Menyusun laporan hasil tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Rencana Aksi	Melakukan dokumentasi atas tindak lanjut rekmendasi hasil evaluasi atas Rencana Aksi	1	Menyiapkan bahan bahan Laporan hasil monitoring dan evaluasi Rencana Aksi atas Kinerja per triwulan													Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
			2	Membuat konsep surat Tindaklanjut Hasil Monitoring Rencana Aksi atas Kinerja													
			3	Mengkonsultasikan konsep surat kepada pimpinan unuk mendapatkan arahan dan persetujuan													
			4	Finalisasi Konsep													

Tabel 3.3
Hasil Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Bapelitbang Tahun 2020

No.	Bidang Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Hasil	Keterangan
1	Memanfaatkan Rencana Aksi dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan (target-target dalam rencana aksi dijadikan dasar pelaksanaan setiap kegiatan dan acuan dalam mengevaluasi capaian autput kegiatan) dan mendokumentasikannya	Dalam memonitoring Rencana Aksi atas Kinerja dilakukan dengan melihat target-target setiap kegiatannya, untuk memantau perkembangan kegiatan apakah sesuai dengan target atau tidak, dan apabila tidak sesuai target khusunya dibawah target, maka dapat diketahui apa permasalahannya dan solusinya.	Dalam laporan monitoring Rencana Aksi atas Kinerja dilakukan dengan melihat target-target setiap kegiatannya, untuk memantau perkembangan kegiatan apakah sesuai dengan target ada kendala dan permasahan sekaligus solusi dari permasalahan.	
2.	Menyusun laporan pembahasan hasil evaluasi atas pencapaian Rencana Aksi kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta mendokumentasikannya hasilnya	Telah dilakukan pemantauan atas Rencana Aksi secara periodik dan analisis capaiannya digunakan untuk perbaikan kinerja selanjutnya. Dan hasil Analisa di sampaikan kepada Kepala Bapelitbang, kemudian Kepala bapelitbang memberikan arahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk perbaikan kinerja	1 Surat Kepala Bapelitbang Nomor 060.4/0685 /Bapelitbang.01 tanggal 22 Juli 2021, tentang Tindak lanjut Hasil Monitoring Rencana Aksi atas Kinerja pada Triwulan II	
			2 Surat Kepala Bapelitbang Nomor 060.4/1039 /Bapelitbang.01 tanggal 19 Oktober 2021, tentang Tindak lanjut Hasil Monitoring Rencana Aksi atas Kinerja pada Triwulan III	
			3 **Hasil Monitoring dan Evaliasi Rencana Aksi Atas Kinerja pada Triwulan kedua** disampaikan pada Rapat Koordinasi Staf pada tanggal 25 Oktober 2021, yang dihadiri oleh Kepala Bapelitbang, Seketaris, Kepala Bidang, Kepala SubBidang/Bagian, Pejabat Fungsional dan staf pelaksana	Notulen Rapat Koordinasi Staf tanggal 01 November 2021
			4 **Hasil Monitoring dan Evaliasi Rencana Aksi Atas Kinerja pada Triwulan Ketiga** disampaikan pada Rapat Koordinasi Staf pada tanggal 03 Deseber 2021, yang dihadiri oleh Kepala Bapelitbang, Seketaris, Kepala Bidang, Kepala SubBidang/Bagian, Pejabat Fungsional dan staf pelaksana	Notulen Rapat Koordinasi Staf, tanggal 03 Desember 2021
3.	Menyusun laporan hasil pemantauan Rencana Aksi secara berkala yang menyajikan informasi terkait alternatifperbaikan yang dapat dilaksnakan	Penyusunan laporan hasil pemantauan Rencana Aksi secara berkala, telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan monoitoring pencapaian Rencana Aksi atas Kinerja secara berkala per Triwulan untuk tahun 2021 dan dilaporkan dalam bentuk Telaah Staf ke Kepala Bapelitbang	1 Telaahan Staf tentang Laporan Monitoring Rencana Aksi Atas Kinerja secara berkala (Triwulan I, II, III dan IV) Tahun Anggaran 2021	
			2 Laporan Monitoring Indikator Kinerja Utama Bapelitbang secara berkala (Triwulan I, II, III dan IV) tahun 2021	
4.	Menyusun laporan hasil tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Rencana Aksi	Melakukan dokumentasi atas tindak lanjut rekmendasi hasil evaluasi atas Rencana Aksi	1 Laporan Hasil Tindak lanjut Atas Rekomendasi LHE Sakip Bapelitbang Tahun 2020	

B. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dan realisasinya. Pengukuran kinerja Bapelitbang per triwulan tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Bapelitbang Per Triwulan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target Capaian Tahun 2021 (%)	Capaian Kinerja (%)												Capaian Akhir (%)
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					Target (%)	Real (%)	Capaian (Real/Target x 100%) (%)	Target (%)	Real (%)	Capaian (Real/Target x 100%) (%)	Target (%)	Real (%)	Capaian (Real/Target x 100%) (%)	Target (%)	Real (%)	Capaian (Real/Target x 100%) (%)	
1	Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1.1.	Persetase keterisian data pembangunan dalam SIPD	100	10,00	15,00	150,00	77,50	82,50	106,45	87,50	90,00	102,86	100,00	100,00	**100,00**	**100,00**
		1.2.	Persentase akurasi data SIPD	100	5,00	5,00	100,00	9,00	8,00	88,89	35,00	50,00	142,86	100,00	100,00	**100,00**	**100,00**
2	Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan serta konsisten antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan	2.1.	Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD	100	31,25	31,25	100,00	64,72	64,50	99,66	88,75	88,76	100,01	100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**
		2.2.	Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD	100	30,00	26,81	89,36	63,75	56,97	89,36	70,71	63,19	89,36	100,00	89,36	**89,36**	**89,36**
		2.3.	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD	≥ 25	25,00	28,25	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**28,25**
		2.4.	Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan	100	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**100,00**
3	Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan	3.1.	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD	100	46,33	21,88	47,21	48,75	45,63	93,59	75,71	71,57	94,53	100,00	84,21	**84,21**	**84,21**
		3.2.	Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)	100	25,00	20,00	80,00	50,00	46,48	92,96	75,00	70,00	93,33	100,00	96,24	**96,24**	**96,24**
4	Optimalisasi penelitian dan pengembangan	4.1.	Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	70	24,50	10,83	44,22	30,19	48,42	160,39	63,00	69,17	109,79	70,00	80,00	**114,29**	**114,29**

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*6*
1	Terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD	100%	100%	100%
		Persentase akurasi data SIPD	100%	100%	100%
2	Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan	Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD	100%	100%	100%
		Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD	100%	89,36%	89,36%
		Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD	≥25%	28,25%	113,00%
		Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan	100%	100%	100%
3	Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD	100%	84,21 %	84,21 %
		Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)	100%	96,24%	96,24%
4	Optimalisasi penelitian dan pengembangan	Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	70,00%	80,00%	114,29%

C. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian atas sasaran-sasaran strategis dapat dijelaskan melalui pencapaian indikator kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

membantu penyediaan data dan informasi pembangunan daerah, penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara elektronik.

SIPD bertujuan untuk: 1) meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan, 2) mengoptimalkan pengumpulan, pengisian, dan evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, serta 3) membangun rumah *legal database* pembangunan untuk seluruh daerah, sebagai dasar input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah.

Capaian indikator sasaran 1 terkait data pembangunan adalah:

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5=(4/3)*100%*
Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD	persen	100	100	100
Persentase akurasi data SIPD	persen	100	100	100

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2021 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Persentase Peningkatan atau (Penurunan) Tahun 2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7-6)/6*100%*
Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD	persen	96	93,72	93,72	91,79	100,00	8,95 %
Persentase akurasi data SIPD	persen	-	100	100	100	100,00	-

Gambar 3.1
Grafik Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2021 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

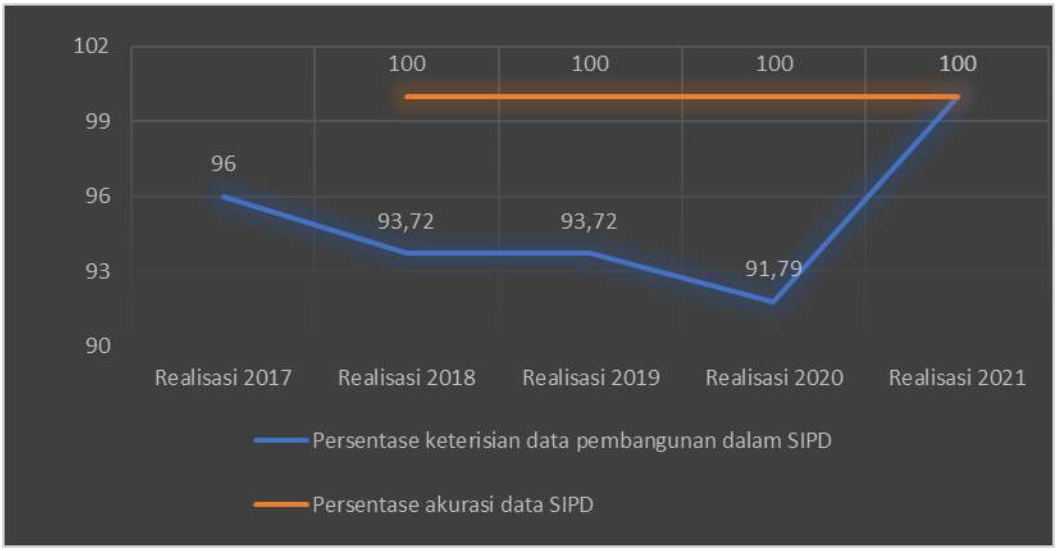

Dari 3.200 item data dalam SIPD yang harus diisi, terdapat 3.200 item yang bisa didapatkan datanya.

Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{jumlah\ elemen\ data\ yang\ terisi}{jumlah\ seluruh\ elemen\ data}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{3.200}{3.200}\ x\ 100\%$$

= 100,00%

Sedangkan persentase akurasi SIPD dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{jumlah\ elemen\ data\ terisi\ yang\ akurat}{jumlah\ elemen\ data\ yang\ terisi}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{3.200}{3.200}\ x\ 100\%$$

= 100%

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2021	Target Akhir Renstra	Persentase Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5=(3/4)*100%*
Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD	persen	100	100	100
Persentase akurasi data SIPD	persen	100	100	100

Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh faktor:

a. Koordinasi intensif dengan Perangkat Daerah selaku produsen data dan Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Walidata Daerah.
b. Dukungan Sistem Informasi Statistik Sektoral Terpadu (SIMPATIKU) yang merupakan sistem pengelolaan data statistik yang mengakomodir seluruh elemen data SIPD.

Sedangkan kendala yang dihadapi adalah:

a. Adanya perubahan regulasi yang menaungi SIPD, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah diganti dengan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berimplikasi pada perubahan aplikasi e-database SIPD dari http://sipd.bangda.kemendagri.go.id menjadi http://kotabontang.sipd.kemendagri.go.id sehingga e-database pada aplikasi sebelumnya tidak dapat diakses dan terdapat kesulitan dalam penginputan.
b. Beberapa elemen data tidak dapat disediakan oleh Perangkat Daerah karena kendala teknis dan ketiadaan anggaran.
c. Adanya pandemic covid-19, yang berdampak pada *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemic covid-19 dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan di beberapa Perangkat Daerah. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan beberapa elemen data tidak dapat disediakan oleh Perangkat Daerah.

Untuk mengatasi kendala di atas, Subbid Data, Penelitian, dan Pengembangan melakukan hal-hal berikut ini:

a. Memastikan agar Perangkat Daerah menganggarkan kegiatan apabila elemen data dimaksud memerlukan anggaran tersendiri.

b. Bersama-sama Walidata Daerah melaksanakan validasi data yang diproduksi oleh Perangkat Daerah sehingga data yang dipublikasikan melalui SIMPATIKU maupun yang digunakan untuk perencanaan pembangunan melalui SIPD dapat dioptimalkan.
c. Melaksanakan pemetaan atau identifikasi data dan data prioritas tahun berikutnya bersama-sama Perangkat Daerah untuk memastikan ketersediaan data oleh Perangkat Daerah.

Pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. *Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD*
2. *Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota*

Tabel 3.9
Realisasi Keuangan Sasaran I Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			
		Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Realisai (Rp.)	Prosentasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)x100%
1.1.1	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**91.177.300**	**91.177.300**	**84.023.500**	**92,15**
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	91.177.300	91.177.300	84.023.500	92,15
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	20.796.250	20.796.250	16.722.500	80,41
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	70.381.050	70.381.050	67.301.000	95,62

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi keuangan pada sasaran ini mencapai 92,15 % dan capaian fisik mencapai 100 %, hal ini menunjukan adanya efesiensi dalam pelaksanaan kegiatan .

Adapun untuk Analisa atas efesiensi Sumber Daya pada Sasaran Terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dapat di lihat pada table berikut ini.

Tabel 3.10
Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	*2*	*3*	*4*	*5 (3-4)*
Terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD	100	92,15	7,85
	Persentase akurasi data SIPD	100	92,15	7,85

Gambar 3.2
Screenshot Aplikasi SIMPATIKU

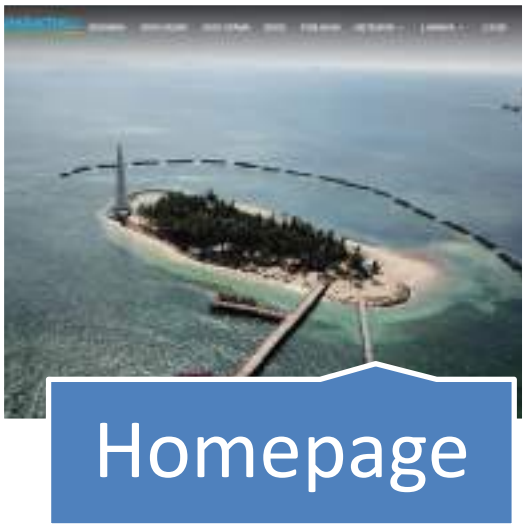

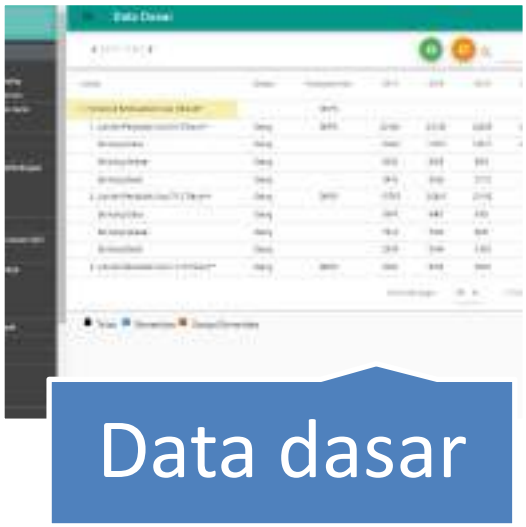

Sasaran 2: Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan

Guna Memaksimalkan fungsi dan keberadaan sistem informasi perencanaan pembangunan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan, dan untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan. Pada sasaran kedua ini memiliki 4 indikator sasaran kinerja, yaitu :

1. Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD
2. Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD
3. Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD
4. Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan

Untuk capaian indikator kinerja pada sasaran kedua tahun 2021 dapat dilihat pada table 3.11

Tabel 3.11
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5=(4/3)*100%*
Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD	Persen	100	100	100,00
Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD	Persen	100	89,36	89,36
Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD	Persen	≥ 25	28,25	113,00
Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan	Persen	100	100	100

Adapun uraian pencapaian setiap indikator sasaran dapat dijelaskan sebagi berikut ;

1. Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD

Dalam dokumen RKPD Kota Bontang Tahun 2021 (Perubahan) terdapat **142** program yang sesuai dengan program dalam RPJMD Kota Bontang 2016-2021 untuk tahun 2020. Di luar program tersebut, terdapat beberapa program yang tidak sesuai dengan program yang telah direncanakan pada tahun 2021 dalam RPJMD Kota Bontang 2016-2021. Program-program ini merupakan respon atas dinamika pembangunan yang berkembang untuk lebih mengoptimalkan

pencapaian tujuan pembangunan jangka pendek atau menyesuaikan dengan perubahan kebijakan. Sedangkan jumlah program yang telah direncanakan pada tahun 2021 dalam RPJMD Kota Bontang 2016-2021 adalah 408 program, dan setelah disesuaikan dengan permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-3708/2020 hanya 169 program.

Pengukuran persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dilakukan sebagai berikut:

$$= \frac{Jumlah\ program\ dalam\ RKPD\ yang\ sesuai\ dengan\ program\ dalam\ RPJMD\ untuk\ tahun\ berkenaan}{Jumlah\ program\ dalam\ RPJMD\ pada\ tahun\ berkenaan}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{169}{169}\ x\ 100\%$$

= 100,00%

Pencapaian indikator kinerja Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD diampu dengan 2 program yaitu :

a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
  - *Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya*
  - *Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota*

b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
  - *Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*
  - *Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia*
- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
  - *Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*
  - *Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*
- Koordinasi Perencanaan Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan
  - *Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*
  - *Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*

Tabel 3.12
Realisasi keuangan indikator kinerja Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			
		Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Realisai (Rp.)	Prosentasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)x100%
2.1.1	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**364.359.234**	**774.259.559**	**665.706.563**	**85,98**
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	364.359.234	774.259.559	665.706.563	85,98
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	*15.675.000*	*145.310.050*	*76.897.200*	*52,92*
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*348.684.234*	*628.949.509*	*588.809.363*	*93,62*
2.1.2	***Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah***	***87.098.956***	***103.302.506***	***93.816.300***	***90,82***
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	28.450.656	38.350.656	37.808.800	98,59
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*13.668.925*	*13.668.925*	*13.533.500*	99,01
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*14.781.731*	*24.681.731*	*24.275.300*	98,35
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	21.590.400	21.590.400	20.958.000	97,07
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*12.140.750*	*12.140.750*	*11.843.000*	97,55
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*9.449.650*	*9.449.650*	*9.115.000*	96,46
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	37.057.900	43.361.450	35.049.500	80,83
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*26.031.450*	*33.181.450*	*27.899.500*	84,08
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*11.026.450*	*10.180.000*	*7.150.000*	70,24

2. Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen RPJMD. Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

RKPD menjadi bahan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA-PPAS harus mendapat persetujuan dari badan legislative sebelum menjadi PPA. PPA yang telah menjadi kesepatakan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan DPRD selanjutnya menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang menjadi bahan masukan dalam penyusunan RAPBD sebelum kemudian ditetapkan menjadi APBD.

Indikator ini dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{Jumlah\ kegiatan\ yang\ dianggarkan\ dalam\ APBD}{Jumlah\ kegiatan\ yang\ ditetapkan\ dalam\ RKPD}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{420}{470}\ x\ 100\%$$

= 89,36 %

Pencapaian indicator ini tidak mencapai target, hal ini proyeksi anggaran pada RKPD lebih tinggi dibandingkan dengan APBD, selain itu pada tahun 2021 anggaran masih diperioritaskan untuk penanganan pandemic covid-19, sehingga ada beberapa kegiatan yang ditunda dan atau dialihkan untuk penanganan pandemic covid-19.

Pencapaian indikator kinerja Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD diampu oleh 1 program yang sama dengan program pengampu indikator *Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD*, namun dengan sub kegiatan yang berbeda, yaitu **Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah :**

- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - *Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan*
  - *Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*

- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA;
  - *Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*
  - *Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*
- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - *Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*
  - *Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan*

Tabel 3.13
Realisasi Kuangan pada Indikator Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			
		Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Realisai (Rp.)	Prosentasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)x100%
2.2.1	***Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah***	**54.007.428**	**61.157.428**	**58.145.000**	**95,07**
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	22.386.553	22.386.553	21.190.750	94,66
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*11.745.800*	*11.745.800*	*11.454.250*	97,52
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*10.640.753*	*10.640.753*	*9.736.500*	91,50
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	14.801.050	14.801.050	13.496.000	91,18
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*9.385.750*	*9.385.750*	*8.920.000*	95,04
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*5.415.300*	*5.415.300*	*4.576.000*	84,50
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	16.819.825	23.969.825	23.458.250	97,87
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*9.669.825*	*16.819.825*	*16.308.250*	96,96
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*7.150.000*	*7.150.000*	*7.150.000*	100,00

3. Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD

Indikator ini dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{Jumlah\ aspirasi\ masyarakat\ yang\ diakomodasi\ dalam\ RKPD}{Jumlah\ total\ aspirasi\ masyarakat}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{113}{400}\ x\ 100\%$$

= 28,25 %

Capaian kinerja pada indikator Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD, tidak target pada triwulan kedua sampai dengan triwulan keempat, karena pelaksanaan Musrenbang hanya satu kali pada triwulan pertama. Pencapaian indikator kinerja Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD diampu **oleh Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**, dengan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dan Sub Kegiatan :

- *Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan*
- *Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota*
- *Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD*

Tabel 3.14
Realisasi Kuangan pada Indikator Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			
		Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Realisai (Rp.)	Prosentasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)x100%
2.3.1	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**123.133.989**	**123.133.989**	**104.174.710**	**84,60**
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	123.133.989	123.133.989	104.174.710	84,60
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	*14.950.991*	*14.950.991*	*14.891.810*	99,60
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*73.312.998*	*73.312.998*	*56.821.900*	77,51
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	*34.870.000*	*34.870.000*	*32.461.000*	93,09

Pada table diatas bahwa realisasi keuangan pada indikator Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD, melalui Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar 84,60 % atau Rp. 104.174.710,- dari Rp. 123.133.989,- dengan target 100 %. Capaian ini tidak memenuhi

target realisasi keuangan. Hal ini dikarenakan adanya efesiensi belanja makanan dan minuman kegiatan sebesar 15,40 % atau Rp. 18.959.279,-

4. Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan

Indikator ini dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{Jumlah\ komponen\ masyarakat\ yang\ berpartisipasi\ dalam\ Musrenbang}{Jumlah\ komponen\ masyarakat\ yang\ harus\ hadir\ dalam\ Musrenbang}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{17}{17}\ x\ 100\% = 100\%$$

Untuk mewujudkan proses perencanaan pembangunan yang partisipatif, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pihak Bapelitbang mengundang seluruh pemangku kepentingan. Komponen masyarakat yang diundang (17 komponen) dan kehadirannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.15
Kehadiran Komponen Masyarakat dalam Musrenbang

No	Komponen Masyarakat	Kehadiran
1	Unsur pimpinan daerah	√
2	DPRD	√
3	Perangkat Daerah	√
4	Delegasi Kecamatan	√
5	Lembaga Hukum	√
6	Militer dan Kepolisian	√
7	Instansi vertikal terkait	√
8	Perusahaan	√
9	Perguruan tinggi dan himpunan mahasiswa	√
10	Perwakilan sekolah	√
11	Perbankan	√
12	Perusda	√
13	Perempuan	√
14	Forum Anak	√
15	Media	√
16	Kadin dan Gapensi	√
17	LPM	√

Pencapaian indikator Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan diampu oleh **Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**, dengan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik

Tabel 3.16
Realisasi Kuangan pada Indikator Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			
		Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Realisai (Rp.)	Prosentasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)x100%
2.4.1	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**11.484.000**	**11.484.000**	**8.723.000**	**75,96**
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	11.484.000	11.484.000	8.723.000	75,96
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	*11.484.000*	*11.484.000*	*8.723.000*	75,96

Pada table diatas bahwa realisasi keuangan hanya 75,96 % atau 8.723.000,- dari Rp. 11.484.000,-. Capaian ini hanya 75,96 % dikarenakan adanya efesiensi belanja makanan dan minuman kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publikasi sebesar Rp. 2.761.000,- atau 24,04 %.

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2020 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Persentase Peningkatan atau (Penurunan)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)/6*100%
Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD	persen	65,84	75,47	73,37	105,88	100,00	- 5,55
Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD	persen	-	95,84	95,89	98,71	89,36	- 9,47
Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD	persen	15,5	23,75	24,50	48,00	28,25	- 41,15
Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan	persen	100	100	100	100	100	0

Gambar 3.3
Grafik Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2021 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

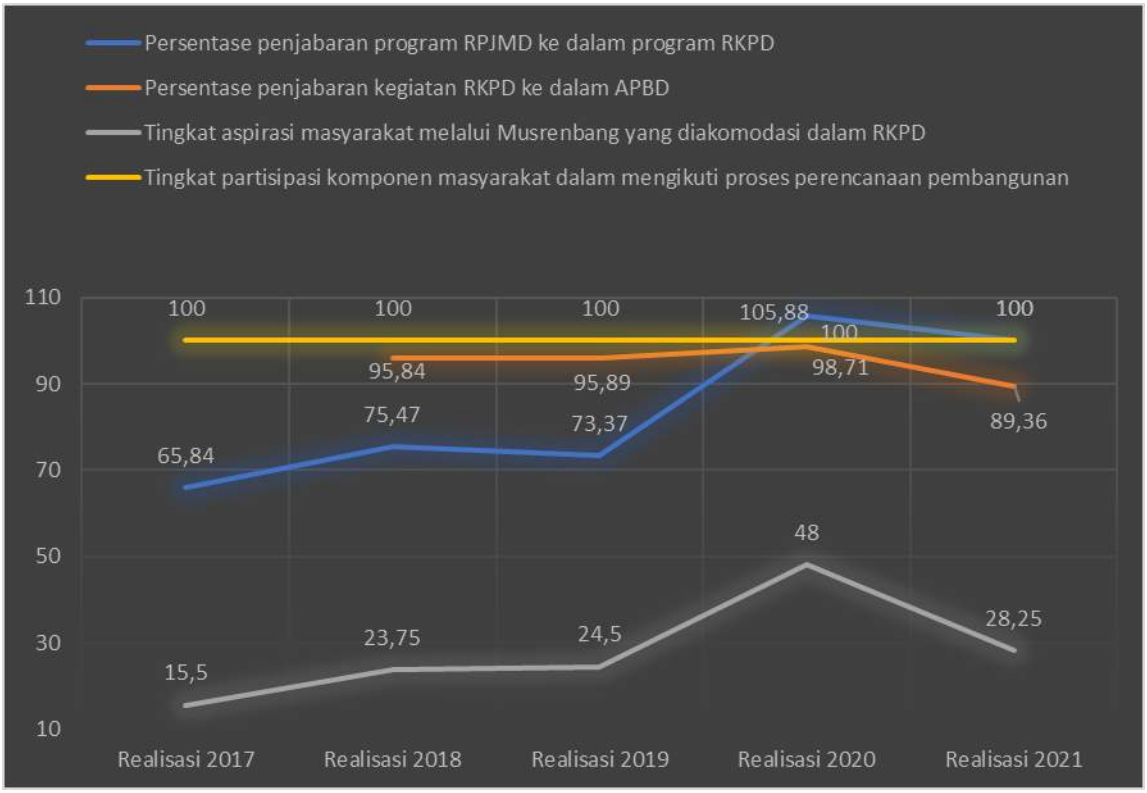

Pada Sasaran 2, apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, maka terjadi peningkatan yang signifikan yaitu dengan peningkatan rata-rata mencapai 35,79 %.

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2021	Target Akhir Renstra	Persentase Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5=(3/4)*100%*
Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD	Persen	100	100	100
Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD	Persen	89,36	100	89,36
Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD	Persen	28,25	≥ 25%	113
Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan	Persen	100	100	100

Apabila dibandingkan dengan target Renstra, capaian indikator kinerja sasaran 2 sampai dengan tahun 2021 sangat baik, yaitu rata-rata presentasi capain 79,40 % .

Faktor yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah :

a. Proses perencanaan dari awal sampai dengan akhir telah dilaksanakan sesuai dengan amanat perundang-undangan sehingga setiap tahap perencanaan telah dijalani sesuai dengan *template* dan waktu yang diamanatkan.
b. Proses perencanaan dengan sistem *bottom up* telah dilaksanakan di tahap awal perencanaan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang partisipatif. Hal ini dapat dilihat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat RT, kelurahan, kecamatan, sampai dengan tingkat kota sehingga aspirasi dari masyarakat dapat ditampung dan diintegrasikan dalam proses perencanaan.
c. Sistem aplikasi perencanaan yang telah terbentuk secara sistematis, sederhana, dan akurat sehingga mempermudah dalam pengolahan data. Hal ini ditunjang oleh adanya aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Terpadu (e-planning).
d. Faktor pendukung lainnya juga terkait dengan peran Bapelitbang dalam melakukan proses asistensi dan verifikasi usulan Rencana Kerja (Renja) PD yang merupakan bagian dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sedangkan faktor yang menghambat pencapaian sasaran ini adalah:

a. Proyeksi anggaran pada RKPD lebih tinggi dibandingkan dengan APBD, sehingga ada beberapa kegiatan yang yang ditunda dan atau dialihkan ke kegiatan yang lebih prioritas.
b. Adanya bencana penyebaran pandemic covid-19, yang berdampak pada refocusing anggaran untuk penanganan pandemic covid-19 dan keterlambatan pelaksanaann kegiatan di beberapa Perengkat Daerah,

Solusi atas permasalahan tersebut adalah adalah sebagai berikut :

a. Bapelitbang salah satu anggota TAPD, akan dikoordinasikan lebih intensif dengan anggota tim TAPD dalam memproyeksi pendapat daerah.
b. Melakukan pendampingan ke Perangkat Daerah pencapaian Indicator Kinerja Utama pada saat melakukan refocusing anggaran perangkat daerah.

Adapun untuk Analisa atas efesiensi Sumber Daya pada Sasaran Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan dapat di lihat pada table berikut ini.

Tabel 3.19

Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	*2*	*3*	*4*	*5 (3-4)*
Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan	Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD	100	88,40	11,60
	Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD	89,36	95,07	- 5,71
	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD	28,25	84,60	- 56,35
	Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan	100	75,96	24,04

Gambar 3.4

Dokumentasi Kegiatan Musrenbang 2021

Sasaran 3: Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan melalui kegiatan-kegiatan koreksi, evaluasi, dan penyesuaian selama pelaksanaan program/kerja oleh Perangkat Daerah. Ketidakefektifan sistem pengendalian dan evaluasi, baik secara metodologi, pelaksanaan, maupun penggunaannya merupakan salah satu ciri dari penyusunan perencanaan yang tidak tepat. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi merupakan tahapan membandingkan serangkaian kegiatan antara realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Jadi, sistem pengendalian dan evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan capaian perencanaan dalam pelaksanaan setiap periode pembangunan daerah.

Untuk capaian indikator kinerja pada sasaran ketiga tahun 2021 dapat dilihat pada table 3.20

Tabel 3.20
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5=(4/3)*100%*
Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD	Persen	100	84,21	84,21
Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)	Persen	100	96,24	96,24

Adapun uraian pencapainan setiap indikator sasaran dapat dijelaskan sebagi berikut ;

1. Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD

Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.21
Capaian Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realiasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua	1 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	tahun	10,45	10,80	103,35
		2 Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	13,00	13,17	101,31
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan untuk Semua	3 Angka Kematian Bayi	rasio	13,00	14,39	89,30
		4 Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran	rasio	103,00	469,90	-256,20
		5 Prevalensi Balita Gizi Kurang	persen	10,00	7,03	129,70
		6 Angka Harapan Hidup	persen	74,28	74,55	100,36
3	Meningkatnya Kesejahteraan Kehidupan Sosial	7 Tingkat Kemiskinan	persen	4,00	4,62	115,50
		8 Tingkat Pengangguran	persen	8,30	9,92	119,52
4	Terwujudnya PenyelenggaraanPemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan partisipatif	9 Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	B	B	96,57
				70,25	67,84	
		10 Nilai LPPD	Nilai	ST	T	107,24
				3,60	3,86	
		11 Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	85,21	84,39	99,04
		12 Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	B	B	100,00
				66,20	66,20	
5	Meningkatkan Cakupan Pengelolaan Sanitasi	13 Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	persen	100,00	94,96	94,96
		14 Cakupan Penanganan Sampah	persen	85,00	99,31	116,84
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Pemukiman	15 Kawasan Perumahan dan Permukinan Kumuh	ha	0,00	16,33	86,74
7	Meningkatnya Akses Pelayanan Air Minum	16 Cakupan Pelayanan Air Minum	persen	100,00	81,18	81,18
8	Terselesaikannya Permasalahan Banjir	17 Luas Wilayah Tergenang	ha	13,91	22,86	60,85
9	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi non Migas	18 Pertumbuhan PDRB non Migas	persen	8-10	4,40	55,00
10	Tersedianya Infrastruktur Kota yang Memadai untuk Mendukung Perkembangan Ekonomi Kota	19 Panjang Jalan Kondisi Baik	persen	91,45	89,99	98,40

Ada beberapa capaian kinerja yang tidak sesuai dengan target seperti :

1. Angka kematian ibu merupakan indikator utama yang digunakan secara internasional untuk mengetahui derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021 sebesar 469,9 rasio dengan capaian -10,6404% dari target 50 per 100.000 kelahiran hidup. Terdapat 16 kasus kematian ibu, dimana 69 persen angka kematian ibu disebabkan oleh pandemi covid-19. Data tersebut didapat dari Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2021.

2. Permasalahan banjir sampai saat ini belum bisa tertangani, masih ada beberapa kendala terkait dengan penanganan banjir yaitu rencana pembebasan lahan untuk pembangunan

folder di daerah Kanaan, ada beberapa lokasi pembangunan turap sungai Bontang belum dilaksanakan, perbaikan dan pembangunan drainase di beberapa lokasi yang belum dikerjakan.

3. Adanya kondisi Kejadian Luar Biasa(KLB) COVID-19 yang berdampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi Kota Bontang (Non Migas), yaitu pertumbuhan ekonomi hanya 4,40 % pada tahun 2021.

Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD dihitung dengan:

$$= \frac{Jumlah\ indikator\ kinerja\ sasaran\ pembangunan\ daerah\ yang\ memenuhi\ target}{Jumlah\ total\ indikator kinerja\ sasaran\ pembangunan\ daerah}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{16}{19}\ x\ 100\%$$

= 84,21 %

Pencapaian kinerja indikator Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD diampu oleh Program :

1. **Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**
   - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah :
     - *Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota*
     - *Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah*
2. **Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**
   - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia :
     - *Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan*
     - *Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*
   - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) :
     - *Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*
     - *Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Sumber Daya Alam)*
   - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan :
     - *Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*

- *Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan*

Tabel 3.22
Realisasi Kuangan pada Indikator Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			
		Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Realisai (Rp.)	Prosentasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)x100%
3.1.1	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**120.004.500**	**120.004.500**	**64.910.000**	**54,09**
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	120.004.500	120.004.500	64.910.000	54,09
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	*75.075.550*	*75.075.550*	*58.585.000*	*78,03*
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	*44.928.950*	*44.928.950*	*6.325.000*	*14,08*
3.1.2	***Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah***	***63.118.681***	***63.118.681***	***48.259.750***	***76,46***
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	23.497.531	23.497.531	22.258.250	94,73
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*11.745.800*	*11.745.800*	*11.553.250*	98,36
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*11.751.731*	*11.751.731*	*10.705.000*	91,09
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	19.470.950	19.470.950	18.686.500	95,97
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12.994.150	12.994.150	12.824.000	98,69
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6.476.800	6.476.800	5.862.500	90,52
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur	20.150.200	20.150.200	7.315.000	36,30
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*13.000.200*	*13.000.200*	*880.000*	*6,77*
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*7.150.000*	*7.150.000*	*6.435.000*	*90,00*

2. Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)

Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%) dihitung dengan :

$$= \frac{Jumlah\ Perangkat\ Daerah\ berkinerja\ baik\ (realisasi\ kinerja \geq 76\%)}{Total\ jumlah\ Perangkat\ Daerah}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{30}{31}\ x\ 100\% = 96{,}24\ \%$$

Program pengampu pada indikator ini adalah Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan sub kegiatan *Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah*.

Tabel 3.23
Realisasi Kuangan pada Indikator Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			
		Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Realisai (Rp.)	Prosentasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)x100%
3.2.1	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**84.881.550**	**84.881.550**	**70.680.000**	**83,27**
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	84.881.550	84.881.550	70.680.000	83,27
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*84.881.550*	*84.881.550*	*70.680.000*	83,27

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi keuangan pada indikator Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%) yang diampu dengan program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sampai dengan triwulan 4 sebesar 83,27 % atau Rp. 70.680.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 84.881.550,-, Capaian ini tidak sesuai dengan target yang disebabkan adanya efesiensi belanja pada pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2021 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Persentase Peningkatan atau (Penurunan)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7-6)/6*100%*
Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD	Persen	63	59,09	90,91	81,82	84,21	22,22
Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)	Persen	89,66	100	100	96,77	96,24	-0,55

Gambar 3.5
Grafik Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2021 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.25
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2021	Target Akhir Renstra	Persentase Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5=(3/4)*100%*
Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD	Persen	84,21	100	84,21
Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)	Persen	96,24	100	96,24

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini, antara lain:

a. Capaian Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD yang tidak memenuhi target, yaitu sebesar 84,21 %. Capaian ini masih dibawah target, hal ini ada 3 Indikator Sasaran Strategis Kota yang tidak tercapai, yaitu :
   - Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran dengan capaian 469,9 rasio dari target 103 rasio.
   - Luas Wilayah Tergenang dengan capain 22,86 Ha dari target 13,91 ha, dan
   - Pertumbuhan PDRB non Migas dengan capaian 4,4 % dari target 8 – 10 %
b. Capaian kinerja pada indikator Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%) adalah 96,24 % dari target 100,00 % dan realisasi 96,24 %. Dari hasil rekapitulasi capaian/realisasi keuangan dan fisik seluruh perangkat daerah, dengan rata-rata capain realisasi keuangan 90,74 % dan realisasi fisik 95,51 %. Capaian ini masih dibawah target dikarenakan :
   1. Ada 1 perangkat daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dengan capaian realisasi keuangan 67,86 % dan realisasi fisik 72,94 %
   2. adanya wabah pandemic covid-19 yang belum dapat ditangan dan cenderung semakin meningkat, sehingga beberapa Perangakat Daerah terlambat melaksanakan pekerjaan terutama pekerjaan fisik/kontruksi dengan pagu anggaran yang sangat besar seperti Dinas PUPR (realisasi Fisik 86,02 %), Dinas Perkim dan Pertanahan (realisasi Fisik 86,23 %), selain itu kondisi cuaca pada akhir tahun merupakan musim penguhjan sehingga secara tidak langsung menghambat progress fisik pekerjaan kontruksi.
3. Adanya faktor eksternal yang berpengaruh terhadap capaian beberapa indikator kinerja daerah seperti: tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan kawasan perumahan dan permukiman kumuh, yaitu tingkat migrasi yang cukup tinggi namun tidak diimbangi dengan keahlian.

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah:

a. Untuk mengatasi masalah pada hambatan yang pertama, yaitu Capaian Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD yang tidak memenuhi target, sebagai berikut :
   - Upaya yang dapat dilakukan untuk menekan kasus kematian ibu adalah dengan pemenuhan sarana dan prasarana kegawatdaruratan obstetri, maternal dan neonatal (baru 2 RS yang ada NICU, Ponek = 2 RS (RSUD dan PKT).
   - Untuk mengatasi terselesaikannya permasalahan banjir, yaitu
     - berkoordinasi secara intensif dan mengawal penganggaran dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dalam penanganan banjir, seperti pembangunan Turap

Sungai Bontang, rencana Pembangunan Folder; Dinas Permukiman dan Pertanahan terkait Pembangunan dan pemeliharaan parit-parit drainase; BPBD Kota Bontang terkait dengan penangan evakuasi korban Banjir.

- berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan rencana pembangunanBendung Pengendali di Daerah Suka Rahmat Kab. Kutai Timur.
- Membuat peta Kawasan Banjir yang terpadu dan ter-Update

- Upaya yang dilakunan untuk mengatasi Pertumbuhan PDRB non Migas dengan capaian 4,4 % yaitu dengan berkoordinasi yang intensif baik dengan Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bontang maupun Provinsi Kaltim dalam rangka menumbuhkembangkan kembali pelaku UMKM pasca pandemic.

b. Untuk mengatasi pada hambatan yang kedua, yaitu Capaian kinerja pada indikator Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%) yang tidak mencapai target. Sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang capaian atau realisasi keuangan dan fisik tidak memenuhi target
2. Meningkatkan kualitas dan kwantitas pada saat pelaksanaan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan asistensi Renja tahunan.
3. Mengevaliasi kinerja perangkat daerah terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bontang (RPJMD)

Adapun untuk Analisa atas efesiensi Sumber Daya pada Sasaran Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dapat di lihat pada table berikut ini.

Tabel 3.26
Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	*2*	*3*	*4*	*5 (3-4)*
Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD	84,21	65,27	18,94
	Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)	96,24	83,27	12,97

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pada Sasaran Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dapat di lihat pada table berikut ini

Gambar 3.6
Dokumentasi Rapat Operasional Pengendalian Kegiatan 2021

Gambar 3.7
Dokumentasi Rapat Paripurna LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2020

Sasaran 4: Optimalisasi penelitian dan pengembangan

Capaian kinerja pada indikator Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah adalah 114,29 % dari target 70,00 % dan realisasi 80,00 %. Capaian ini sesuai dengan target yang di tetapkan.

Tabel 3.27
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5=(4/3)*100%*
Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persen	70	80,00	114,29

Selama ini Perangkat Daerah menyelenggarakan sendiri kegiatan penelitian dan pengembangan melalui penyusunan kajian/studi/naskah akademik bekerja sama dengan perguruan tinggi/lembaga lain. Hasil kajian tersebut tidak seluruhnya ditindaklanjuti dan dimanfaatkan dalam perencanaan dan pembangunan. Fungsi penelitian dan pengembangan pada Bapelitbang diarahkan untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan kelitbangan sehingga dapat diterapkan dan memberikan manfaat dalam perencanaan dan pembangunan daerah. Sebagai fungsi baru, langkah awal yang dilakukan adalah inventarisasi data kajian/litbang pada perangkat daerah untuk menghitung tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan.

Dari 10 dokumen, terdapat 8 yang ditindaklanjuti. Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{Jumlah\ dokumen\ penelitian\ dan\ pengembangan\ yang\ diaplikasikan}{Jumlah\ total\ dokumen\ penelitian\ dan\ pengembangan}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{8}{10}\ x\ 100\%$$

= 80,00 %

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2021 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Persentase Peningkatan atau (Penurunan)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7-6)/6*100%*
Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	persen	65,07	66,03	80	73,18	80,00	9,32

Gambar 3.8
Grafik Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2021 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.29
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2021	Target Akhir Renstra	Persentase Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5=(3/4)*100%*
Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	persen	80,00	70	114,29

Keberhasilan terhadap tercapainya indikator ini didukung oleh factor sebagai berikut:

a. Koordinasi intensif dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan kelitbangan sesuai urusannya.
b. Rencana Induk Kelitbangan (RIK) telah disusun sehingga diharapkan kelitbangan selama lima tahun kedepan akan lebih terarah untuk mendukung perencanaan pembangunan.

Permasalahan yang dihadapi terkait pencapaian indikator ini adalah:

a. Lambatnya PD dalam melaporkan hasil Kelitbangan yang ada dan Kurangnya komitmen OPD dalam menerapkan hasil kajian dalam kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan
b. Minimnya anggaran dalam menciptakan inovasi yang berkelanjutan dan Jejaring inovasi daerah (replikasi internal) belum berjalan optimal
c. Jumlah peserta yang mengikuti lomba inovasi daerah masih rendah dengan target peserta dari unsur DPRD, ASN, OPD, Masyarakat, Walikota, sedangkan selama ini peserta yang mengikuti masih didominasi hanya dari pihak OPD dan ASN, dan Kelengkapan administrasi dari inovasi daerah belum maksimal khususnya untuk mengikuti Penilaian Indeks Inovasi Daerah (IGA 2021), serta Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan Posyantek belum dapat dikomersilkan.

Solusi untuk permasalahan tersebut adalah:

a. Upaya mengatasi permalahan pertama :
   - Sosialisasi dan koordinasi yang intens dengan peragkat daerah
   - Mengintensifkan pelibatan pihak akademisi dan praktisi untuk meningkatkan kualitas kajian yang sudah ada
   - Perlu adanya Diseminasi khusus yang bersifat teknis terkait tema kajian dengan melibatkan OPD tertentu.
b. Upaya mengatasi permasalah kedua :
   - Mengadakan Bimtek Inovasi Daerah dengan memberikan penjelasan dan motivasi tentang inovasi daerah
   - Pendampingan inovator dalam pengisian indeks inovasi daerah
   - Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
   - Melakukan koordinasi dengan TAPD terkait dengan apresiasi bagi innovator
c. Upaya mengatasi permasalah ketiga :
   - Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk dapat memfasilitasi dan memanfaatkan TTG yang dihasilkan Posyantek
   - Mendorong pihak swasta melalui program CSR untuk memfasilitasi kualitas produk TTG
   - Peningkatan kuantias dan kualitas penelitian melalui BIMTEK

Pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui program **Program Pengembangan Data/Informasi** dengan kegiatan:

a. Koordinasi Penelitian dan Pengembangan.

b. Dukungan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pencapaian realisasi keuangan pada indikator Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang diampu oleh program Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sampai dengan triwulan 4 sebesar 93,44 % atau Rp. 931.536.098,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 996,932,874,- Capaian ini tidak sesuai dengan target yang disebabkan adanya efesiensi belanja pada pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.30
Realisasi Keuangan indikator Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			
		Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Realisai (Rp.)	Prosentasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)x100%
4.1.1	**Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**	**825.641.200**	**996.932.874**	**931.536.098**	**93,44**
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	461.220.000	510.887.800	460.890.098	90,21
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	*256.050.000*	*255.718.000*	*220.394.377*	86,19
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	*6.435.000*	*6.435.000*	*3.960.000*	61,54
	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	*198.735.000*	*248.734.800*	*236.535.721*	95,10
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	364.421.200	486.045.074	470.646.000	96,83
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	*7.150.000*	*7.150.000*	*7.007.000*	98,00
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	*346.694.700*	*468.318.574*	*458.276.500*	97,86
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	*10.576.500*	*10.576.500*	*5.362.500*	50,70

Adapun untuk Analisa atas efesiensi Sumber Daya pada Sasaran Optimalisasi penelitian dan pengembangan dapat di lihat pada table berikut ini.

Tabel 3.31
Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	*2*	*3*	*4*	*5 (3-4)*
Optimalisasi penelitian dan pengembangan	Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	114,29 %	94,44 %	19,85 %

Gambar 3.9
Dokumentasi Kegiatan Serah Terima Seremonial Penghargaan Peserta Lomba Si Peena Tahun 2021 (Kategori Inovasi Kelompok Masyarakat Dan Perangkat Daerah).

D. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran belanja Bapelitbang Kota Bontang sesuai Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA) 2021 sebesar **Rp12.852.729.208,00** dengan realisasi anggaran sebesar **94,57 %** atau Rp . yang terdiri dari

Tabel 3.32
Realisasi Anggaran Bapelitbang Tahun 2021

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran			
		Murni	Perubahan	Realisasi	Prosentase
1	Operasi	10.878.303.590	11.556.012.351	11.008.958.737	95,27
2	Modal	296.883.456	1.296.716.857	1.146.492.500	88,42
3	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
4	Transfer	-	-	-	-
	Jumlah	**11.175.187.046**	**12.852.729.208**	**12.155.451.237**	**94,57**

Untuk dapat menentukan tingkat efesiensi dalam pelaksanan kegiatan terhadap realisasi keuangan dan fisik, dengan mengukur presentasi perbandingan antara realisasi keuangan dengan realisasi fisik.

Efesiensi $= \frac{Realisasi\ Keuangan}{Realisasi\ Fisik}\ x\ 100\%$

Adapun klasifikasi efesien sebagai berikut :

Tabel 3.33
Klasifikasi Nilai Efesiensi

No.	Katagori	Ring	Nilai
1.	Sangat Efesien	≤ 85 %	≥ 85 %
2.	Efesien	85 – 90 %	10 – 15 %
3.	Cukup Efesien	90 – 95 %	5 – 10 %
4.	Kurang Efesien	95 – 100 %	0 – 5 %
5	Tidak Efesien	≥ 100 %	≤ 100 %

Sesuai dengan rumusan efesiensi dan tabel klasifikasi nilai efesiensi, maka nilai efeseinsi terhadap realisasi keuangan dan fisik Bapelitbang Tahun 2021 pada zona ***Cukup Efesien*** yaitu 90 – 95 sebesar 5,43 % atau Rp. 697.277.971,-. Efesiensi dilaksanakan pada belanja :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja makan minum kegiatan,

3. Belanja Pengadaan Laptop
4. Belanja Pemeliharaan berkala kendaraan dinas/operasional

Realisasi anggaran (berdasarkan DPA Perubahan) yang di gunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan data pada tabel berikut :

Tabel 3.34
Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Pagu Anggaran				Realisasi Fisik	Efisiensi	Keterangan
					Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentasi (%)	(%)	(%)	
1	Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1.1 Persetase keterisian data pembangunan dalam SIPD	1.1.1	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**91.177.300**	**91.177.300**	**84.023.500**	**92,15**	**100,00**	**92,15**	***Cukup efisien***
		1.2. Persentase akurasi data SIPD		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	91.177.300	91.177.300	84.023.500	92,15			
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	20.796.250	20.796.250	16.722.500	80,41			
				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	70.381.050	70.381.050	67.301.000	95,62			
2	Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan serta konsisten antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan	2.1. Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD	2.1.1	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**364.359.234**	**774.259.559**	**665.706.563**	**85,98**	**100,00**	**85,98**	***Efesien***
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	364.359.234	774.259.559	665.706.563	85,98			
				Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	*15.675.000*	*145.310.050*	*76.897.200*	*52,92*			
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*348.684.234*	*628.949.509*	*588.809.363*	*93,62*			
			2.1.2	***Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah***	***87.098.956***	***103.302.506***	***103.302.506***	***100,00***	**100,00**	**100,00**	***tidak efisien***
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	28.450.656	38.350.656	38.350.656	100,00			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*13.668.925*	*13.668.925*	*13.533.500*	99,01			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*14.781.731*	*24.681.731*	*24.275.300*	98,35			

No.	Sasaran	Indikator Sasaran		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran				Realisasi Fisik	Efisiensi	Keterangan
					Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentasi (%)	(%)	%	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	21.590.400	21.590.400	20.958.000	97,07			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*12.140.750*	*12.140.750*	*11.843.000*	97,55			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*9.449.650*	*9.449.650*	*9.115.000*	96,46			
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	37.057.900	43.361.450	35.049.500	80,83			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*26.031.450*	*33.181.450*	*27.899.500*	84,08			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*11.026.450*	*10.180.000*	*7.150.000*	70,24			
		2.2. Persentase penjabaran kegiatan . RKPD ke dalam APBD	2.2.1	***Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah***	**54.007.428**	**61.157.428**	**58.145.000**	**95,07**	**100,00**	**95,07**	***Kurang efisien***
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	22.386.553	22.386.553	21.190.750	94,66			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*11.745.800*	*11.745.800*	*11.454.250*	97,52			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*10.640.753*	*10.640.753*	*9.736.500*	91,50			
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	14.801.050	14.801.050	13.496.000	91,18			

No.	Sasaran	Indikator Sasaran		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran				Realisasi Fisik	Keterangan
					Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentasi (%)	(%)	(Efesiens/ Tidak Efesien)
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*9.385.750*	*9.385.750*	*8.920.000*	95,04		
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*5.415.300*	*5.415.300*	*4.576.000*	84,50		
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	16.819.825	23.969.825	23.458.250	97,87		
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*9.669.825*	*16.819.825*	*16.308.250*	96,96		
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*7.150.000*	*7.150.000*	*7.150.000*	100,00		
		2.3. Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD	2.3.1	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**123.133.989**	**123.133.989**	**104.174.710**	**84,60**	**100,00**	***Efesien***
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	123.133.989	123.133.989	104.174.710	84,60		
				Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	*14.950.991*	*14.950.991*	*14.891.810*	99,60		
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*73.312.998*	*73.312.998*	*56.821.900*	77,51		
				Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	*34.870.000*	*34.870.000*	*32.461.000*	93,09		
		2.4. Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti	2.4.1	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**11.484.000**	**11.484.000**	**8.723.000**	**75,96**	**100,00**	***Efesien***
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	11.484.000	11.484.000	8.723.000	75,96		
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	*11.484.000*	*11.484.000*	*8.723.000*	75,96		
3	Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan	3.1. Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD	3.1.1	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**120.004.500**	**120.004.500**	**64.910.000**	**54,09**	**100,00**	***Efesien***
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	120.004.500	120.004.500	64.910.000	54,09		
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	*75.075.550*	*75.075.550*	*58.585.000*	*78,03*		
				Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	*44.928.950*	*44.928.950*	*6.325.000*	*14,08*		

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Pagu Anggaran				Realisasi Fisik	Keterangan
					Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentasi (%)	(%)	(Efesiens/ Tidak Efesien)
			3.1.2	***Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah***	***63.118.681***	***63.118.681***	***48.259.750***	***76,46***	**100,00**	***Efesien***
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	23.497.531	23.497.531	22.258.250	94,73		
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*11.745.800*	*11.745.800*	*11.553.250*	98,36		
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*11.751.731*	*11.751.731*	*10.705.000*	91,09		
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	19.470.950	19.470.950	18.686.500	95,97		
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12.994.150	12.994.150	12.824.000	98,69		
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6.476.800	6.476.800	5.862.500	90,52		
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	20.150.200	20.150.200	7.315.000	36,30		
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*13.000.200*	*13.000.200*	*880.000*	*6,77*		
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*7.150.000*	*7.150.000*	*6.435.000*	*90,00*		

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Pagu Anggaran				Realisasi Fisik	Keterangan
					Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentasi (%)	(%)	(Efesiens/ Tidak Efesien)
		3.2. Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)	3.2.1	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**84.881.550**	**84.881.550**	**70.680.000**	**83,27**	**100,00**	***Efesien***
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	84.881.550	84.881.550	70.680.000	83,27		
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*84.881.550*	*84.881.550*	*70.680.000*	83,27		
4	Optimalisasi penelitian dan pengembangan	4.1. Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	4.1.1	**Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**	**825.641.200**	**996.932.874**	**931.536.098**	**93,44**	**100,00**	***Efesien***
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	461.220.000	510.887.800	460.890.098	90,21		
				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	*256.050.000*	*255.718.000*	*220.394.377*	86,19		
				Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	*6.435.000*	*6.435.000*	*3.960.000*	61,54		
				Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	*198.735.000*	*248.734.800*	*236.535.721*	95,10		
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	364.421.200	486.045.074	470.646.000	96,83		
				Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	*7.150.000*	*7.150.000*	*7.007.000*	98,00		
				Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	*346.694.700*	*468.318.574*	*458.276.500*	97,86		
				Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	*10.576.500*	*10.576.500*	*5.362.500*	50,70		

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran				Realisasi Fisik	Keterangan
				Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentasi (%)	(%)	(Efesiens/ Tidak Efesien)
5	*Penunjang (Program rutin)*		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**8.843.657.238**	**10.251.574.795**	**9.903.397.066**	**96,60**	**100,00**	***Efesien***
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.724.608.044	6.248.605.994	6.178.730.259	98,88		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*6.724.608.044*	*6.248.605.994*	*6.178.730.259*	*98,88*		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.210.000	361.141.000	357.120.500	98,89		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	*308.511.000*	*306.910.500*	99,48		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*36.210.000*	*52.630.000*	*50.210.000*	95,40		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.024.739.102	2.408.396.207	2.244.203.787	93,18		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*1.334.982*	*1.334.982*	*1.334.982*	*100,00*		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Bangunan Kantor	*451.474.037*	*1.401.170.942*	*1.244.396.280*	*88,81*		
			Penyediaan Bahan Logitik Kantor	*181.246.710*	*221.706.910*	*221.007.400*	*99,68*		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*77.339.373*	*77.339.373*	*70.975.650*	*91,77*		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*313.344.000*	*706.844.000*	*706.489.475*	*99,95*		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	583.393.792	593.410.192	586.847.345	98,89		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*8.550.000*	*8.550.000*	*8.550.000*	100,00		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*574.843.792*	*584.860.192*	*578.297.345*	98,88		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	474.706.300	640.021.402	536.495.175	83,82		
			Pengadaan Mebel	-	*175.628.002*	*168.010.000*	95,66		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pejak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*444.731.300*	*434.418.400*	*353.976.175*	*81,48*		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*29.975.000*	*29.975.000*	*14.509.000*	*48,40*		

Tabel 3.35
Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Bapelitbang selama 4 tahun (2018 – 2021)

Tahun	Total Anggaran Belanja Bapelitbang																						Total Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		
	Belanja Pegawai							Belanja Barang dan Jasa							Belanja Modal										
	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran	Realisasi Fisik	Efesiensi		Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran	Realisasi Fisik	Efesiensi		Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran	Realisasi Fisik	Efesiensi					
	Rp.	Rp.	%	Rp.	%	%	Katagori	Rp.	Rp.	%	Rp.	%	%	Katagori	Rp.	Rp.	%	Rp.	%	%	Katagori	Prog.	Keg.	Sub Keg.
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4) = (2) - (3)*	*(5)*	*(6)=(3)/(5)x100%*	*(7)*	*(8)*	*(9)*		*(10) = (8) - (9)*	*(11)*	*(12)=(9)/(11) x100%*	*(13)*	*(14)*	*(15)*		*(16) = (14) - (15)*	*(17)*	*(18)=(15)/(17) x100%*	*(19)*	*(20)*		
2018	4.472.439.807	4.083.001.075	91,29	389.438.732	100	91,29	Cukup Efesien	2.132.862.150	1.999.917.313	93,77	132.944.837	100	93,77	Cukup Efesien	253.300.000	236.155.600	93,23	17.144.400	100	93,23	Cukup Efesien	12	26	0
2019	5.762.062.922	5.112.223.952	88,72	649.838.970	100	88,72	Efesien	4.722.874.470	4.174.509.547	88,39	548.364.923	100	88,39	Efesien	860.580.000	816.302.000	94,85	44.278.000	100	94,85	Cukup Efesien	12	44	0
2020	6.336.697.839	5.922.006.367	93,46	414.691.472	100	93,46	Cukup Efesien	4.697.436.056	4.495.928.528	95,71	201.507.528	100	95,71	Kurang Efesien	1.047.647.440	1.013.088.600	96,70	34.558.840	100	96,70	Kurang Efesien	12	47	0
2021	6.316.333.994	6.236.690.259	98,74	79.643.735	100	98,74	Kurang Efesien	5.239.678.357	4.772.268.478	91,08	467.409.879	100	91,08	Cukup Efesien	1.296.716.857	1.146.492.500	88,42	150.224.357	100	88,42	Efesien	4	14	51

BAB IV
PENUTUP

Dari keseluruhan sasaran strategis pada umumnya telah memenuhi capaian target sasaran pada tahun 2020. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Bapelitbang Kota Bontang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu program pembangunan di Kota Bontang. Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Bapelitbang Kota Bontang dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2021 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Bapelitbang Kota Bontang memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur, masyarakat, serta dunia usaha sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan.

Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Bapelitbang Kota Bontang dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Bapelitbang Kota Bontang, sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah untuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui:

   a. Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya aparatur perencana serta menambah aparatur fungsional khusus di bidang perencanaan;
   b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
   c. Mengupayakan penerapan *reward and punishment* secara proporsional;
   d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisis pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;

e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan di dalam dokumen perencanaan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah pada tahun mendatang.
3. Melakukan sinkronisasi dan komitmen yang kuat dalam penyusunan program kerja/anggaran antara pola *top down* dengan *bottom up* sehingga mencerminkan semua kebutuhan organisasi yaitu kebutuhan Pemerintah Kota sesuai dengan arah kebijakan pembangunan serta aspirasi dari masyarakat luas dapat terpenuhi.
4. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di propinsi maupun dengan Perangkat Daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
5. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan akan lebih ditingkatkan.